



(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

## Pastikan Program Langsung Menyentuh Masyarakat

**PONTIANAK** – PSekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Barat Harisson memastikan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan oleh pemerintah selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan menanggapi isu di pusat tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Azwar Anas sempat menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga saat menghadiri Sosialisasi Permen PANRB No.1/2023 di Jakarta, Jumat (27/1). Menurutnya anggaran yang mencapai hampir Rp500 triliun itu, justru lebih banyak terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Sehingga

Menpan RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk di Pemprov Kalbar dalam program pengentasan kemiskinan tentunya tidak mengikuti pusat. Kalau pusat ini kan sebenarnya lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi, dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang (peserta) daerah, pakar atau ahli. Hasilnya itu lah yang dikirim ke pemprov, maupun kabupaten/kota," ungkap Harisson kepada awak media, Selasa (31/1).

Karena itu, Harisson memastikan untuk diprov hingga pemerintah kabupaten/kota program pengentasan kemiskinan selalu bersifat langsung. Program yang dijalankan tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasarannya penduduk miskin,



SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

**KETERANGAN:** Sekda Kalbar Harisson saat memberikan keterangan tentang program pengentasan kemiskinan di Kalbar kepada awak media, Selasa (31/1).

dan tersebar di beberapa perangkat daerah terkait.

Diantaranya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, ada program beasiswa untuk menggratiskan iuran di SMA sederajat negeri. Lalu ada bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam, buku, dan lainnya untuk masyarakat miskin.

Contoh lainnya di Dinas Kesehatan, selalu dilaksanakan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, atau wilayah penduduk

miskin. Pemprov juga telah membangun fasilitas di RSUD Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap. Semua itu menurutnya untuk melayani masyarakat, termasuk masyarakat miskin. "Kemudian (Pemprov) juga mensubsidi warga PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS kesehatan," katanya.

Tak hanya itu, di Dinas PUPR dan Perkim, dikatakan Harisson, juga banyak melaksanakan



kegiatan yang menyentuh masyarakat, dan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Seperti perbaikan atau bedah rumah warga yang tidak layak huni, dan lainnya.

"Di PUPR kami bangun infrastruktur jalan, termasuk infrastruktur pertanian. Sehingga itu semua akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dalam

rangka mengentaskan kemiskinan di Kalbar. Selain itu juga masih banyak lagi, program-program yang tersebar di beberapa perangkat daerah lain," tambahnya.

Harisson lantas menjelaskan, persentase penduduk miskin Kalbar pada bulan September 2022 angkanya sebesar 6,81 persen, atau meningkat 0,08 poin bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022. Semenjak itu juga dibandingkan dengan bulan September 2021, angka tersebut menurun

0,03 poin. Persentase penduduk miskin itu terdiri dari persentase penduduk miskin perkotaan, yang pada bulan Maret 2022 sebesar 4,44 persen, lalu naik menjadi 4,63 persen pada bulan September 2022. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 8,06 persen, naik menjadi 8,10 persen pada bulan September

2022.

Meski demikian, angka kemiskinan Kalbar menurutnya masih jauh di bawah angka nasional. Dimana angka kemiskinan Indonesia tahun 2022 sebesar 9,57 persen, selisih 2,76 poin dari angka kemiskinan Kalbar yang 6,81 persen. Sedangkan dari lima provinsi-Pulau Kalimantan, Kalbar berada di peringkat keempat

terendah. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah pertama adalah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 4,61 persen, kedua Kalimantan Tengah (Kalteng) 5,22 persen, ketiga Kalimantan Timur (Kaltim) 6,44 persen, keempat Kalbar 6,81 persen, dan peringkat terakhir Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 6,86 persen. (bar)